



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR .. TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan Kabupaten Kebumen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah

wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 Agustus 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp2.992.699.969.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp134.353.527.420,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.127.053.496.420,00 (tiga triliun seratus dua puluh tujuh miliar lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp2.906.114.900.000,00
2. Berkurang	(Rp 176.303.668,00)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.905.938.596.332,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp2.992.699.969.000,00
2. Bertambah	Rp 134.353.527.420,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp3.127.053.496.420,00
Defisit setelah perubahan	(Rp 221.114.900.088,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp 94.685.069.000,00
b) Bertambah	Rp 128.529.831.088,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 223.214.900.088,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp 8.100.000.000,00
b) Berkurang	(Rp 6.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.100.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp221.114.900.088,00

SILPA setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	583.543.180.000,00
2. Berkurang	(Rp	84.551.578,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	583.458.628.422,00
setelah perubahan		

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp	2.322.571.720.000,00
2. Berkurang	(Rp	91.752.090,00)
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	2.322.479.967.910,00
setelah perubahan		

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp	0,00
2. Berkurang	(Rp	0,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	0,00
setelah perubahan		

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1. Semula	Rp	238.536.294.000,00
2. Berkurang	(Rp	7.418.555.916,00)
Jumlah Pajak Daerah	Rp	231.117.738.084,00
setelah perubahan		

b. Retribusi Daerah;

1. Semula	Rp	305.248.729.000,00
2. Bertambah	Rp	15.776.690.000,00
Jumlah Retribusi Daerah	Rp	321.025.419.000,00
setelah perubahan		

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

1. Semula	Rp	31.438.212.000,00
2. Berkurang	(Rp	7.517.685.662,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	23.920.526.338,00
--	----	-------------------

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

1. Semula	Rp	8.319.945.000,00
2. Berkurang	(Rp	925.000.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	7.394.945.000,00
--	----	------------------

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat;

1. Semula	Rp2.199.272.864.000,00
2. Berkurang	(Rp 1.488.752.090,00)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp2.197.784.111.910,00
--	------------------------

b. Transfer Antar Daerah;

1. Semula	Rp	123.298.856.000,00
2. Bertambah	Rp	1.397.000.000,00

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp	124.695.856.000,00
--	----	--------------------

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Pendapatan Hibah:

1. Semula	Rp	0,00
2. Berkurang	(Rp	0,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
---	----	------

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1. Semula	Rp2.065.004.679.351,00
2. Bertambah	Rp 77.980.376.845,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp2.142.985.056.196,00
--	------------------------

b. Belanja Modal;	
1. Semula	Rp 293.516.561.558,00
2. Bertambah	Rp 65.716.080.899,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 359.232.642.457,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1. Semula	Rp 2.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp 6.166.309.816,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp 8.166.309.816,00
d. Belanja Transfer;	
1. Semula	Rp 632.178.728.091,00
2. Berkurang	(Rp 15.509.240.140,00)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp 616.669.487.951,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;	
1. Semula	Rp1.219.965.113.840,00
2. Bertambah	Rp 49.220.389.207,00
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan	Rp1.269.185.503.047,00
b. Belanja Barang dan Jasa;	
1. Semula	Rp 753.821.169.051,00
2. Bertambah	Rp 53.907.903.739,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp 807.729.072.790,00
c. Belanja Subsidi;	
1. Semula	Rp 1.950.000.000,00
2. Bertambah	Rp 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp 1.950.000.000,00
d. Belanja Hibah;	
1. Semula	Rp 83.052.184.460,00
2. Berkurang	(Rp 21.289.704.101,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp 61.762.480.359,00
e. Belanja Bantuan Sosial;	
1. Semula	Rp 6.216.212.000,00

2. Berkurang	(Rp	3.858.212.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	2.358.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

1. Semula	Rp	7.711.912.000,00
2. Berkurang	(Rp	40.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	7.671.912.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1. Semula	Rp	44.864.576.200,00
2. Bertambah	Rp	8.732.684.440,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	53.597.260.640,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

1. Semula	Rp	54.664.725.169,00
2. Bertambah	Rp	25.517.896.688,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	80.182.621.857,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

1. Semula	Rp	176.856.802.189,00
2. Bertambah	Rp	25.875.449.771,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp	202.732.251.960,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

1. Semula	Rp	9.418.546.000,00
2. Bertambah	Rp	5.630.050.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	15.048.596.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah Belanja Tidak Terduga:

a. Semula	Rp	2.000.000.000,00
-----------	----	------------------

b. Bertambah	Rp	6.166.309.816,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	8.166.309.816,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil;		
1. Semula	Rp	19.398.981.000,00
2. Bertambah	Rp	8.371.261.900,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	27.770.242.900,00
b. Belanja Bantuan Keuangan;		
1. Semula	Rp	612.779.747.091,00
2. Berkurang	(Rp	23.880.502.040,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	588.899.245.051,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;		
1. Semula	Rp	94.685.069.000,00
2. Bertambah	Rp	128.529.831.088,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	223.214.900.088,00
b. Pengeluaran Pembiayaan;		
1. Semula	Rp	8.100.000.000,00
2. Berkurang	(Rp	6.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	2.100.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA tahun sebelumnya;		
1. Semula	Rp	92.585.069.000,00
2. Bertambah	Rp	128.529.831.088,00
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp	221.114.900.088,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1. Semula	Rp	2.100.000.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	2.100.000.000,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah;

1. Semula	Rp	6.000.000.000,00
2. Berkurang	(Rp	6.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp	0,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah;

1. Semula	Rp	2.100.000.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	2.100.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2026.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan mengenai uraian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

- h. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- o. lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: